

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JULI 2011

**PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

A. IDENTITAS

Instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal :
 Alamat :
 Telepon dan Faksimili :
 E-mail :
 Nama pimpinan :

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

I. Kompetensi Penanaman Modal

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama	a > 80% ber-Sertifikat;	20	
		b > 60% - 80% ber-Sertifikat;	16	
		c > 40% - 60% ber-Sertifikat;	12	
		d > 20% - 40% ber-Sertifikat;	8	
		e ≤ 20% ber-Sertifikat;	4	
2	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan*	a > 80% ber-Sertifikat;	20	
		b > 60% - 80% ber-Sertifikat;	16	
		c > 40% - 60% ber-Sertifikat;	12	
		d > 20% - 40% ber-Sertifikat;	8	
		e ≤ 20% ber-Sertifikat;	4	
3	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektor*	a > 80% ber-Sertifikat;	20	
		b > 60% - 80% ber-Sertifikat;	16	
		c > 40% - 60% ber-Sertifikat;	12	
		d > 20% - 40% ber-Sertifikat;	8	
		e ≤ 20% ber-Sertifikat;	4	
4	Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman	a > 80% ber-Sertifikat;	40	
		b > 60% - 80% ber-Sertifikat;	32	

Modal*	c > 40% - 60% ber-Sertifikat;	24
	d > 20% - 40% ber-Sertifikat;	16
	e ≤ 20% ber-Sertifikat;	8
Jumlah		

*catatan: ditetapkan sebagai Indikator Penilaian pada tahun 2014.

II. Kompetensi Pengelolaan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Pengalaman SDM	a > 80% sesuai	30	
		b > 60% - 80% sesuai	24	
		c > 40% - 60% sesuai	18	
		d > 20% - 40% sesuai	12	
		e ≤ 20% sesuai	6	
2	Spesialisasi SDM	a > 80% sesuai	25	
		b > 60% - 80% sesuai	20	
		c > 40% - 60% sesuai	15	
		d > 20% - 40% sesuai	10	
		e ≤ 20% sesuai	5	
3	Komposisi SDM	a 100 % Aparatur daerah (PNS);	25	
		b Ada honorer atau <i>outsourcing</i> ;	0	
4	Penguasaan Bahasa Asing	a > 80% ber-Sertifikat;	20	
		b > 60% - 80% ber-Sertifikat;	16	
		c > 40% - 60% ber-Sertifikat;	12	
		d > 20% - 40% ber-Sertifikat;	8	
		e ≤ 20% ber-Sertifikat;	4	
Jumlah				

III. Pengalaman Pengelolaan Layanan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Pengalaman Penanaman Modal	a ≥ 4 tahun;	60	
		b 3 tahun;	45	
		c 2 tahun;	30	

		d 1 tahun;	15	
2	Pengalaman Layanan Penanaman Modal	a \geq 4 tahun;	40	
		b 3 tahun;	30	
		c 2 tahun;	20	
		d 1 tahun;	10	
		Jumlah		

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

I. Otomasi Layanan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE)	a > 80% Otomasi;	30	
		b > 60% - 80% Otomasi;	24	
		c > 40% - 60% Otomasi;	18	
		d > 20% - 40% Otomasi;	12	
		e \leq 20% Otomasi;	6	
2	SPIPISE*	a > 80% SPIPISE;	70	
		b > 60% - 80% SPIPISE;	56	
		c > 40% - 60% SPIPISE;	42	
		d > 20% - 40% SPIPISE;	28	
		e \leq 20% SPIPISE;	14	
		Jumlah		

*Catatan: ditetapkan sebagai Indikator Penilaian pada tahun 2013

II. Komposisi Ruang

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Ruang Tunggu	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
2	Ruang Help Desk	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	

3	Ruang Layanan (Front Office)	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
4	Ruang Pemrosesan (Back Office)	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
5	Ruang/Tempat Arsip	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
Jumlah				

III. Sarana Kerja

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Komputer	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
2	Jaringan Internet	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
3	Telepon/Faksimili	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
4	Mesin Pengganda Dokumen	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
5	Printer	a Memiliki	20	
		b Tidak	0	
Jumlah				

IV. Media Informasi

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Tanda Arah Lokasi Kantor	a Memiliki	25	
		b Tidak	0	
2	Papan Nama Kantor	a Memiliki	25	
		b Tidak	0	
3	Petunjuk (Panduan) Layanan	a Memiliki	25	
		b Tidak	0	
4	Leaflet/Brosur Jenis	a Memiliki	25	

Layanan	b Tidak	0	
Jumlah			

D. ASPEK KELEMBAGAAN

I. Kinerja

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Metode Antrian	a memiliki	20	
		b tidak	0	
2	Kemampuan Pelayanan	a > 80% sesuai standar;	40	
		b > 60% - 80% sesuai standar;	32	
		c > 40% - 60% sesuai standar;	24	
		d > 20% - 40% sesuai standar;	16	
		e ≤ 20% sesuai standar;	8	
3	Pembiayaan Layanan	a > 80% bebas biaya;	40	
		b > 60% - 80% bebas biaya;	32	
		c > 40% - 60% bebas biaya;	24	
		d > 20% - 40% bebas biaya;	16	
		e ≤ 20% bebas biaya;	8	
Jumlah				

II. Kewenangan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Kapasitas PTSP	a > 80% dilayani oleh PTSP;	50	
		b > 60% - 80% oleh PTSP;	40	
		c > 40% - 60% oleh PTSP;	30	
		d > 20% - 40% oleh PTSP;	20	
		e ≤ 20% dilayani oleh PTSP;	10	
2	Legalitas PTSP	a > 80% ditetapkan Perda;	20	
		b > 60% - 80% ditetapkan Perda;	16	
		c > 40% - 60% ditetapkan Perda;	12	
		d > 20% - 40% ditetapkan Perda;	8	

		e ≤ 20% ditetapkan Perda;	4	
3	Kapabilitas PTSP	a > 80% oleh Ka PTSP;	30	
		b > 60% - 80% Ka PTSP;	24	
		c > 40% - 60% Ka PTSP;	18	
		d > 20% - 40% Ka PTSP;	12	
		e ≤ 20% oleh Ka PTSP;	6	
		Jumlah		

III. Integritas

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	<i>Standard Operating Procedures</i>	a > 80% dilayani ber-SOP;	30	
		b > 60% - 80% ber-SOP;	24	
		c > 40% - 60% ber-SOP;	18	
		d > 20% - 40% ber-SOP;	12	
		e ≤ 20% ber-SOP;	6	
2	Komunikasi Birokrasi	a > 80% dikomunikasikan;	30	
		b > 60% - 80% dikomunikasikan;	24	
		c > 40% - 60% dikomunikasikan;	18	
		d > 20% - 40% dikomunikasikan;	12	
		e ≤ 20% dikomunikasikan;	6	
3	Kesesuaian dengan SOP Pusat	a > 80% telah sesuai;	40	
		b > 60% - 80% telah sesuai;	32	
		c > 40% - 60% telah sesuai;	24	
		d > 20% - 40% telah sesuai;	16	
		e ≤ 20% telah sesuai;	8	
		Jumlah		

IV. Soliditas

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Penyelesaian Masalah	a > 80% selesai;	50	
		b > 60% - 80% selesai;	40	
		c > 40% - 60% selesai;	30	

		d > 20% - 40% selesai;	20	
		e ≤ 20% selesai;	10	
2	Kemampuan Penyelesaian	a > 80% selesai;	50	
		b > 60% - 80% selesai;	40	
		c > 40% - 60% selesai;	30	
		d > 20% - 40% selesai;	20	
		e ≤ 20% selesai;	10	
		Jumlah		

V. Kestinambungan (*Sustainability*)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Pengakuan kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a Sangat Baik (81,26 - 100)	70	
		b Baik (62,51 - 81,26)	56	
		c Kurang Baik (43,76 - 62,50)	42	
		d Tidak Baik (25,00 - 43,75)	28	
		e Tidak berpredikat (< 25,00)	14	
		f Belum melakukan survey	0	
2	Penjaringan Umpan Balik Eksternal	a > 4 tahun;	30	
		b > 2-4 tahun;	20	
		c ≤ 2 tahun;	10	
		d Belum melakukan	0	
		Jumlah		

VI. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	<i>Help Desk</i>	a Ada petugas Help Desk	20	
		b Tidak Ada	0	
2	Mekanisme Penanganan Pengaduan	a Ada Mekanisme Pengaduan	20	
		b Tidak Ada	0	
3	Formulir Pengaduan	a Ada Form Pengaduan	20	
		b Tidak Ada	0	

4	Kotak Saran	a Ada Kotak Saran	20	
		b Tidak Ada	0	
5	Deadline Jawaban Pengaduan	a Ada Batas Waktu Jawaban	20	
		b Tak Ada	0	
		Jumlah		

VII. Tanggung Gugat (Akuntabilitas)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Penilaian
		Kriteria	Nilai	
1	Fungsi PTSP	a Menyatu dengan instansi Penanaman Modal	70	
		b Belum menyatu dengan instansi Penanaman Modal	10	
2	Dasar Hukum Lembaga PTSP	a Peraturan Daerah	30	
		b Peraturan Kepala Daerah	20	
		c Surat Keputusan Kepala Daerah	10	
		Jumlah		

E. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No	Komponen	Nilai
1	Kompetensi Penanaman Modal	
2	Kompetensi Pengelolaan	
3	Pengalaman Pengelolaan Layanan	
Jumlah Nilai Komponen		
Nilai Rata-Rata		

F. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

No	Komponen	Nilai
1	Otomasi Layanan	
2	Komposisi Ruang	
3	Sarana Kerja	
4	Media Informasi	
Jumlah Nilai Komponen		

Nilai Rata-Rata

G. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN

No	Komponen	Nilai
1	Kinerja	
2	Kewenangan	
3	Integritas	
4	Soliditas	
5	Kesinambungan (Sustainability)	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	
7	Tanggung Gugat (Akuntabilitas)	
Jumlah Nilai Komponen		
Nilai Rata-Rata		

H. LEMBAR PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI

PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI				
NO	ASPEK KUALIFIKASI	NILAI RATA-RATA ASPEK	BOBOT	NILAI AKHIR ASPEK
1	SUMBER DAYA MANUSIA		50%	
2	SARANA DAN PRASARANA		25%	
3	KELEMBAGAAN		25%	
TOTAL			100%	

....., 20.....

ttd

Tandatangan Pimpinan Penyelenggara PTSP
 Nama Jelas
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN
 LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 JULI 2011

**PEDOMAN PENGISIAN
PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

A. IDENTITAS

- Instansi Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal : Tuliskan nama instansi penyelenggara PTSP dibidang penanaman modal dengan lengkap.
- Alamat : Uraikan alamat lengkap instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
- Telepon, Faksimili dan e-mail : Tuliskan nomor telepon, nomor faksimili, alamat *e-mail* dan situs (*website*) instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
- Pimpinan : Sebutkan nama, gelar pendidikan, pangkat dan golongan serta NIP (Nomor Induk Pegawai) Kepala penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.

B. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)**I. Kompetensi Penanaman Modal**

1	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama	Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP Di Bidang Penanaman Modal (wajib bagi pejabat dan petugas <i>Front Office</i> , pejabat dan petugas <i>Back Office</i> , serta pejabat dan petugas <i>Help Desk</i>) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
2	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat	Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal

	Lanjutan	<p>(wajib bagi pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, pejabat dan petugas <i>Back Office</i>, serta pejabat dan petugas <i>Help Desk</i>) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.</p>
3	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral	<p>Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (wajib bagi pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, pejabat dan petugas <i>Back Office</i>, serta pejabat dan petugas <i>Help Desk</i>) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.</p>
4	Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, pejabat dan petugas <i>Back Office</i>, serta pejabat dan petugas <i>Help Desk</i>) yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BKPM atau oleh lembaga Diklat yang memiliki kurikulum penanaman modal yang telah disertifikasi oleh Pusdiklat BKPM.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.</p>

II. Kompetensi Pengelolaan

1	Pengalaman SDM	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas <i>Help Desk</i>, petugas <i>Front Office</i>, petugas <i>Back Office</i>, petugas Tata Usaha dan petugas <i>Information Technology</i>) yang berlatar belakang pengalaman kerja memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi (kinerja) PTSP di bidang penanaman modal. Relevansi pengalaman kerja dapat dilihat berdasarkan kriteria kualifikasi jabatan yang diatur dalam uraian (analisa) jabatan yang dipersyaratkan (disusun) oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
2	Spesialisasi SDM	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas <i>Help Desk</i>, petugas <i>Front Office</i>, petugas <i>Back Office</i>, petugas Tata Usaha dan petugas <i>Information Technology</i>) yang berlatar belakang pendidikan yang memiliki relevansi dengan bidang pekerjaan di PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Relevansi latar belakang pendidikan dapat dilihat berdasarkan kriteria kualifikasi jabatan yang diatur dalam uraian (analisa) jabatan yang dipersyaratkan (disusun) oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
3	Komposisi SDM	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah pegawai penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal (wajib bagi pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, pejabat dan petugas <i>Back Office</i>, serta pejabat dan</p>

		<p>petugas <i>Help Desk</i>) yang berstatus aparatur pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun berstatus honorer (<i>outsourcing</i>).</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila seluruh pegawai yang dimaksud berstatus PNS. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, pejabat dan petugas <i>Back Office</i>, serta pejabat dan petugas <i>Help Desk</i> berstatus honorer (<i>outsourcing</i>).</p>
4	Penguasaan Bahasa Asing	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah SDM penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (terutama Kepala PTSP di bidang penanaman modal, pejabat dan petugas <i>Help Desk</i>, pejabat dan petugas <i>Front Office</i>, serta pejabat dan petugas <i>Back Office</i>) yang memiliki Sertifikat Bahasa Asing (terutama bahasa Inggris, atau salah satu bahasa resmi PBB) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal (BAN-PNF).</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>

III. Pengalaman Pengelolaan Layanan

1	Pengalaman Penanaman Modal	<p>Diisi dengan kondisi faktual lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal sesuai tata cara permohonan penanaman modal yang dikeluarkan Pemerintah.</p> <p>Lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam <i>form</i> penilaian standar kualifikasi.</p> <p>Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
2	Pengalaman Layanan Penanaman Modal	<p>Diisi dengan kondisi faktual lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang</p>

	<p>penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal sesuai tata cara (kewenangan) yang diatur pemerintahan daerah.</p> <p>Lamanya waktu instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal telah melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam <i>form</i> penilaian standar kualifikasi.</p> <p>Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
--	---

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

I. Otomasi Layanan

1	Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE)	<p>Diisi dengan kondisi faktual penggunaan sistem otomasi layanan (penerapan <i>Information and Communication Technology</i>) pada setiap tahapan pemrosesan arus layanan (<i>flow chart</i>) perizinan dan nonperizinan yang saling terkoneksi.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
2	SPIPISE	<p>Diisi dengan kondisi faktual implementasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) pada pemrosesan perizinan dan nonperizinan sesuai tata cara permohonan penanaman modal.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>

II. Komposisi Ruang

1	Ruang Tunggu	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Tunggu yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila</p>
---	--------------	---

		memiliki Ruang Tunggu. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "0", apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Tunggu.
2	Ruang <i>Help Desk</i>	Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang <i>Help Desk</i> yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal. Hasil Penilaian diisi dengan angka "20" apabila memiliki Ruang <i>Help Desk</i> . Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "0", apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang <i>Help Desk</i> .
3	Ruang Layanan (Ruang <i>Front Office</i>)	Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Layanan (Ruang <i>Front Office</i>) yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal. Hasil Penilaian diisi dengan angka "20" apabila memiliki Ruang Layanan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "0", apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Layanan.
4	Ruang Pemrosesan (Ruang <i>Back Office</i>)	Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang <i>Back Office</i> (Ruang Pemrosesan) yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal. Hasil Penilaian diisi dengan angka "20" apabila memiliki Ruang Pemrosesan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "0", apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Pemrosesan.
5	Ruang/Tempat Arsip	Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan Ruang Arsip atau tempat penyimpanan arsip yang memadai sebagai prasarana kerja PTSP di bidang penanaman modal. Hasil Penilaian diisi dengan angka "20" apabila memiliki Ruang Arsip. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "0", apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Ruang Arsip.

III. Sarana Kerja

1	Komputer	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat komputer yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal .</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat komputer. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat komputer.</p>
2	Jaringan Internet	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan jaringan internet yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki jaringan internet. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki jaringan internet.</p>
3	Telepon/Faksimili	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat telepon dan faksimili (sarana komunikasi) yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat telepon. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat telepon.</p>
4	Mesin Pengganda Dokumen	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat mesin pengganda dokumen yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat mesin pengganda dokumen. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat mesin pengganda dokumen.</p>
5	<i>Printer</i>	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan perangkat <i>printer</i> yang memadai sebagai sarana kerja PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki perangkat <i>printer</i>. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki perangkat <i>printer</i>.</p>

IV. Media Informasi

1	Tanda Arah Lokasi Kantor	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan papan petunjuk informasi keberadaan lokasi kantor PTSP di bidang penanaman modal yang diletakkan di tempat umum yang strategis (<i>public area</i>), seperti stasiun, bandara, terminal, pelabuhan atau prasarana umum lainnya.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Tanda Arah Lokasi Kantor. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki <i>Signboard</i> lokasi kantor.</p>
2	Papan Nama Kantor	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan papan informasi nama kantor PTSP di bidang penanaman modal yang diletakkan di muka bangunan pada halaman depan kantor PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Papan Nama Kantor. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Papan Nama Kantor.</p>
3	Petunjuk Layanan (Panduan)	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan informasi/petunjuk arah lokasi setiap ruang atau <i>counter</i> layanan yang ada di kantor PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki Panduan Layanan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki Petunjuk (Panduan) Layanan.</p>
4	Leaflet/Brosur Layanan Jenis	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan brosur (selebaran) yang menginformasikan jenis produk layanan disertai penjelasan prosedur layanannya secara jelas, rinci dan akurat.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “25” apabila memiliki <i>Leaflet</i>/Brosur Jenis Layanan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki <i>Leaflet</i>/Brosur Jenis Layanan.</p>

D. ASPEK KELEMBAGAAN

I. Kinerja

1	Metode Antrian	<p>Diisi dengan kondisi faktual penggunaan sistem antrian (<i>queuing system</i>) baik secara manual atau elektronik dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan di PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila menggunakan sistem antrian. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak menjalankan sistem antrian.</p>
2	Kemampuan Pelayanan	<p>Diisi dengan kondisi faktual kinerja layanan rata-rata dalam setiap bulan yang mampu dilakukan PTSP di bidang penanaman modal dalam memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai Standar Waktu Layanan yang telah ditetapkan.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
3	Pembiayaan Layanan	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah permohonan layanan perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi (biaya) sebagaimana yang telah ditetapkan (diatur) oleh peraturan daerah.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>

II. Kewenangan

1	Kapasitas PTSP	<p>Diisi dengan kondisi faktual jumlah (proporsi) seluruh layanan perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang dilayani di PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form</p>
---	----------------	--

		penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.ang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.
2	Legalitas PTSP	Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani PTSP di bidang penanaman modal dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3	Kapabilitas PTSP	Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan ditandatangani langsung oleh Kepala PTSP di bidang penanaman modal. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.

III. Integritas

1	<i>Standard Procedures</i> <i>Operating</i>	Diisi dengan kondisi faktual jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal memiliki proses kerja yang terperinci. <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) merupakan rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin dalam pemrosesan perizinan dan nonperizinan yang diuraikan secara detail. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2	Komunikasi Birokrasi	Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan dikomunikasikan melalui media cetak maupun

		elektronik khusus. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
3	Kesesuaian Dengan SOP Pusat	Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dan telah sesuai dengan petunjuk SOP Pemerintah. Perhitungan komposisi (persentase) dari perbandingan layanan yang telah ditetapkan oleh SOP daerah namun selaras dengan SOP Pemerintah, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan

IV. Soliditas

1	Penyelesaian Masalah	Diisi dengan kondisi faktual jumlah permasalahan (komplain) tentang layanan perizinan dan nonperizinan (yang dilayangkan oleh setiap penerima layanan dalam satu periode) yang mampu diselesaikan dengan baik dalam periode setahun terakhir. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.
2	Kemampuan Penyelesaian	Diisi dengan kondisi faktual dari jumlah permasalahan (komplain) tentang layanan perizinan dan nonperizinan yang berhasil diselesaikan secara internal (mandiri) oleh penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dalam periode setahun terakhir. Perhitungan komposisi (persentase) dari kondisi faktual tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum dalam form penilaian standar kualifikasi. Hasil Penilaian diisikan berdasarkan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.

V. Kestinambungan (*Sustainability*)

1	Pengakuan Kualitas IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<p>Diisi dengan kondisi faktual dari pengakuan masyarakat terhadap tingkat kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang menggambarkan tentang kinerja pelayanan PTSP di bidang penanaman modal.</p> <p>Tingkat kualitas layanan berdasarkan survey IKM periode terakhir yang dilakukan oleh penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal, disesuaikan dengan Nilai Interval Konversi IKM (Mutu Pelayanan) dengan Rentang Kriteria yang tercantum. Hasil Penilaian diisikan dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriterianya.</p>
2	Penjaringan Umpan Balik Eksternal	<p>Diisi dengan kondisi faktual dari periode penerimaan “sertifikat standar mutu” dari lembaga penjaminan mutu kompeten (<i>International Organization for Standardization</i>).</p> <p>Berdasarkan periode dari pengakuan standar mutu tersebut, selanjutnya sesuaikan dengan Rentang Kriteria yang tercantum. Hasil Penilaian diisi dengan angka pada Rentang Nilai yang selaras dengan Rentang Kriteria tersebut.</p>

VI. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

1	Help Desk	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan petugas <i>Help Desk</i> yang cepat tanggap dalam menindaklanjuti kebutuhan penerima layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan PTSP di bidang penanaman modal .</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki petugas <i>Help Desk</i>. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki petugas <i>Help Desk</i>.</p>
2	Mekanisme Penanganan Pengaduan	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan tata cara dalam proses penyampaian pengaduan (komplain) layanan perizinan dan nonperizinan sampai dengan cara kerja proses penyelesaiannya.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki mekanisme pengaduan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki mekanisme pengaduan.</p>

3	Formulir Pengaduan	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan form pengaduan sebagai sarana dokumentasi pengajuan keluhan terhadap layanan perizinan dan nonperizinan yang dialami penerima layanan.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki ketersediaan form pengaduan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki ketersediaan form pengaduan.</p>
4	Kotak Saran	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan kotak saran yang memadai sebagai sarana PTSP di bidang penanaman modal dalam menampung pengaduan (klaim) yang diajukan secara tertulis (terdokumentasi) oleh penerima layanan perizinan dan nonperizinan.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki kotak saran. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki kotak saran.</p>
5	<i>Deadline</i> Jawaban Pengaduan	<p>Diisi dengan kondisi faktual ketersediaan batas (tenggat) waktu yang diberikan penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal dalam menyanggupi pemberian jawaban serta penyelesaian masalah dari pengaduan (komplain) yang diajukan penerima layanan perizinan dan nonperizinan.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “20” apabila memiliki batas waktu jawaban pengaduan. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “0”, apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal tidak memiliki batas waktu jawaban pengaduan.</p>

VII. Tanggung Gugat (Akuntabilitas)

1	Fungsi PTSP	<p>Diisi dengan kondisi faktual kelembagaan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yaitu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi lainnya.</p> <p>Hasil Penilaian diisi dengan angka “70” apabila instansi pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal menyatu dengan PDPPM atau PDKPM. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka “10”, apabila instansi pelaksana fungsi PTSP</p>
---	-------------	---

		di bidang penanaman modal tidak menyatu dengan PDPPM atau PDKPM.
2	Dasar Hukum Lembaga PTSP	Diisi dengan kondisi faktual dari dasar hukum pembentukan PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil Penilaian diisi dengan angka "30" apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Peraturan Daerah. Hasil Penilaian diisi dengan angka "20" apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Hasil Penilaian diisi dengan angka "10" apabila instansi PTSP di bidang penanaman modal dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.

E. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1	Kompetensi Penanaman Modal	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-I, Kompetensi Penanaman Modal.
2	Kompetensi Pengelolaan	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-II, Kompetensi Pengelolaan.
3	Pengelolaan Layanan	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form B-III, Pengelolaan Layanan.
4	Jumlah Nilai Komponen	Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form E - Rekapitulasi Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
5	Nilai Rata-Rata	Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi "3 (tiga)" (sesuai dengan jumlah <i>form</i>).

F. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

1	Otomasi Layanan	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-I, i Otomasi Layanan.
2	Komposisi Ruangan	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-II, i Komposisi Ruangan.
3	Sarana Kerja	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-III, Sarana Kerja.
4	Media Informasi	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form C-IV, Media Informasi.
5	Jumlah Nilai Komponen	Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form F - Rekapitulasi Penilaian Aspek Sarana Dan Prasarana (Sarpras).
6	Nilai Rata-Rata	Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi "4 (empat)" (sesuai dengan jumlah <i>form</i>).

G. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN

1	Kinerja	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-I, Kinerja.
2	Kewenangan	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-II, Kewenangan.
3	Integritas	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-III, Integritas.
4	Soliditas	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-IV, Soliditas.
5	Kesinambungan (<i>Sustainability</i>)	Diisi berdasarkan jumlah dari kolom Hasil Penilaian pada form D-V, yakni Kesinambungan (<i>Sustainability</i>).
6	Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-VI, Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>).
7	Tanggung Gugat (Akuntabilitas)	Diisi berdasarkan jumlah kolom Hasil Penilaian pada form D-VII, Tanggung Gugat (Akuntabilitas).
8	Jumlah Nilai Komponen	Diisi berdasarkan jumlah kolom Nilai pada form G - Rekapitulasi Penilaian Aspek Kelembagaan.
9	Nilai Rata-Rata	Diisi dengan hasil dari Jumlah Nilai Komponen dibagi dengan "7 (Tujuh)" (sesuai dengan jumlah form).

H. PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI

1	Nilai Rata-Rata Aspek Sumber Daya Manusia	Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form E, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
2	Nilai Rata-Rata Aspek Sarana dan Prasarana	Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form F, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Sarana Dan Prasarana (Sarpras).
3	Nilai Rata-Rata Aspek Kelembagaan	Diisi dengan hasil yang diperoleh dari Nilai Rata-Rata pada form G, yakni Rekapitulasi Penilaian Aspek Kelembagaan.
4	Nilai Akhir Aspek Sumber Daya Manusia	Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Sumber Daya Manusia dengan bilangan "50%" (sebagai Bobot SDM).
5	Nilai Akhir Aspek Sarana dan Prasarana	Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Sarana dan Prasarana dengan bilangan "25%" (sebagai Bobot

		SARPRAS).
6	Nilai Akhir Aspek Kelembagaan	Diisi berdasarkan hasil yang diperoleh dengan mengalikan Nilai Rata-Rata Aspek Kelembagaan dengan bilangan "25%" (sebagai Bobot Kelembagaan).
7	Total	Diisi berdasarkan jumlah keseluruhan dari kolom Nilai Akhir Aspek.

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL: 18 JULI 2011

DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	PROFIL	DOKUMEN PENDUKUNG
1	Nama PTSP di bidang penanaman modal	Surat keterangan Kepala PTSP di bidang penanaman modal;
2	Status (Kedudukan)	Surat keterangan Kepala PTSP di bidang penanaman modal;
3	Alamat (dan <i>contact person</i>)	Surat keterangan Kepala PTSP di bidang penanaman modal;
4	Jabatan Pimpinan PTSP di bidang penanaman modal (Literatur dan Nama Pimpinan)	Riwayat hidup, SK Keangkatan, SK Pengangkatan, <i>copy</i> ijazah pendidikan formal dan non-formal;
5	Landasan hukum PTSP di bidang penanaman modal	Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota;
6	Tugas dan Fungsi PTSP di bidang penanaman modal	Bagan (struktur) organisasi;
7	Sarana PTSP di bidang penanaman modal	Foto;
8	Prasarana PTSP di bidang penanaman modal	<i>Layout</i> kantor, denah bangunan, status bangunan;

9	Aksesibilitas Lokasi PTSP di bidang penanaman modal	Peta lokasi, trayek transportasi umum;
10	Jenis Layanan dan Penerima Layanan	<i>Flowchart</i> layanan;
11	Tenaga (SDM) PTSP di bidang penanaman modal	Riwayat hidup, SK Kepegangatan, SK Pengangkatan, copy ijazah pendidikan formal dan non-formal;
12	Manajemen Kearsipan	Foto;
13	Teknologi komunikasi	Alamat portal, <i>flowchart</i> interkoneksi LAN dengan perangkat daerah, dan <i>flowchart</i> layanan otomatis;
14	Media Informasi	Brosur, <i>leaflet</i> , stiker, <i>billboard</i> , reklame, pengumuman, papan informasi, dsb;
15	Hasil <i>self assesment</i>	Direkomendasikan oleh Kepala Daerah (minimal Sekda);

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 Tahun 2011
 TANGGAL : 18 Juli 2011

A. Daftar Negara Yang Telah Melakukan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) *Investment Guarantee Agreement* (IGA) dengan Indonesia

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 13. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) | 25. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) |
| 2. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 14. Filipina, Republik (<i>The Republic of the Philippines</i>) | 26. Kanada (Canada) |
| 3. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 15. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 27. Korea Selatan/Korea, Republik (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) |
| 4. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 16. Guyana, Republik (<i>Republic of Guyana</i>) | 28. Korea Utara/Korea, Republik Demokrasi (<i>North Korea/People's Republic of Korea</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 17. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 29. Kroasia, Republik (<i>Republic of Croatia</i>) |
| 6. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 30. Kuba, Republik (<i>Republic of Cuba</i>) |
| 7. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 31. Kirgizstan, Republik (<i>Kyrgyz Republic</i>) |
| 8. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 20. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 32. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (<i>Lao People's Democratic Republic</i>) |
| 9. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 21. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 33. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab (<i>The Great Socialist People's Libyan Arab</i>) |

- Jamahiriya*
- | | | |
|--|---|---|
| 10. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 22. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 34. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 11. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 23. Jepang (<i>Japan</i>)* | 35. Maroko, Kerajaan (<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 24. Jerman (<i>Germany</i>) | 36. Mauritius, Republik (<i>Republic of Mauritius</i>) |
| 37. Mesir, Republik Arab (<i>The Arab Republic of Egypt</i>) | 49. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 61. Ukraina (<i>Ukraine</i>) |
| 38. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 50. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 62. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) |
| 39. Mozambik, Republik (<i>Republic of Mozambique</i>) | 51. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 63. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist</i> |
| 41. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 53. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 65. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 42. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) | 54. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 66. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 43. Polandia, Republik (<i>Republic of Poland</i>) | 55. Swiss, Konfederasi (<i>Swiss Confederation / Switzerland</i>) | |
| 44. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 56. Tajikistan, Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) | |
| 45. Rumania (<i>Romania</i>) | 57. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom Thailand</i>) | |
| 46. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) | 58. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) | |
| 47. Singapura, Republik (<i>The Republic of Singapore</i>) | 59. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | |
| 48. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 60. Turkmenistan (<i>Turkmenistan</i>) | |

*) Dalam bentuk JIEPA (*Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*)

B. Daftar Negara Yang Memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dengan Indonesia

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 15. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) | 29. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 2. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 16. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 30. Meksiko Serikat, Negara (<i>The United Mexican States</i>) |
| 3. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 17. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 31. Mesir, Republik Arab (<i>The Arab Republic of Egypt</i>) |
| 4. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 32. Mongolia (<i>Mongolia</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 33. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) |
| 6. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 20. Iran, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Iran</i>) | 34. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 7. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 21. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 35. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) |
| 8. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 22. Jepang (<i>Japan</i>) | 36. Polandia, Republik (<i>Republic of Poland</i>) |
| 9. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 23. Jerman (<i>Germany</i>) | 37. Portugal, Republik (<i>Republic of Portugal</i>) |
| 10. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 24. Kanada (<i>Canada</i>) | 38. Qatar, Negara (<i>The State of Qatar</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 11. Bulgaria, Republik
(<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 25. Korea, Republik Demokrasi Rakyat/Korea Utara(<i>People's Republic of Korean/North Korea</i>) | 39. Rumania
(<i>Romania</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 26. Korea, Republik/Korea Selatan (<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) | 40. Rusia, Federasi
(<i>The Russian Federation</i>) |
| 13. Cina, Republik Rakyat
(<i>The People's Republic of China</i>) | 27. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) | 41. Selandia Baru
(<i>New Zealand</i>) |
| 14. Denmark, Kerajaan
(<i>Kingdom of Denmark</i>) | 28. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 42. Seychelles, Republik (<i>The Republic of Seychelles</i>) |
| 43. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 49. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 55. Ukraina
(<i>Ukraine</i>) |
| 44. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) | 50. Swiss, Konfederasi
(<i>The Swiss Confederation</i>) | 56. Uni Emirat Arab
(<i>The United Arab Emirates</i>) |
| 45. Spanyol, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Spain</i>) | 51. Taiwan (<i>Taiwan</i>) | 57. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) |
| 46. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokrasi
(<i>The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 52. Thailand, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 58. Venezuela, Republik Bolivar
(<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) |
| 47. Sudan, Republik (<i>The Republic of the Sudan</i>) | 53. Tunisia, Republik (<i>The Republic of Tunisia</i>) | 59. Vietnam, Republik Sosialis
(<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 48. Suriah, Republik (<i>The Republic of Suriah</i>) | 54. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 60. Yordania Hashimiah, Kerajaan
(<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |

C. Daftar Negara Penandatanganan Perjanjian Regional ASEAN
terkait bidang Penanaman Modal

-
1. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Di Kawasan ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement /ACIA*)
 - a) Brunei Darussalam (*Brunei Darussalam*);
 - b) Filipina, Republik (*The Republic of Philippines*);
 - c) Indonesia, Republik (*The Republic of Indonesia*);
 - d) Kamboja, Kerajaan (*The Kingdom of Cambodia*);
 - e) Laos, Republik Demokrasi Rakyat (*The Lao People's Democratic Republic*);
 - f) Malaysia (*Malaysia*);
 - g) Myanmar, Uni (*The Union of Myanmar*);
 - h) Singapura, Republik (*The Republic of Singapore*);
 - i) Thailand, Kerajaan (*The Kingdom of Thailand*);
 - j) Vietnam, Republik Sosialis (*The Socialist Republic of Vietnam*).
 2. *Agreement Establishing the ASEAN – Australian- New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).*
 3. *Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nation And The Republic Of Korea.*
 4. *Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China.*

D. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO*)

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Albania, Republik
(<i>The Republic of Albania</i>) | 16. Belgia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 31. Cina Taipei
(<i>Chinese Taipei</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik
(<i>Republic of South Africa</i>) | 17. Belize (<i>Belize</i>) | 32. Denmark, Kerajaan
(<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik
(<i>Central African Republic</i>) | 18. Benin, Republik
(<i>The Republic of Benin</i>) | 33. Djibouti, Republik
(<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 4. Amerika Serikat
(<i>The United States of America</i>) | 19. Bolivia, Republik
(<i>Republic of Bolivia</i>) | 34. Dominika,
Persemakmuran
(<i>Commonwealth of Dominica</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 5. Angola, Republik
(<i>The Republic of Angola</i>) | 20. Botswana, Republik
(<i>Republic of Botswana</i>) | 35. Dominikan, Republik
(<i>Dominican Republic</i>) |
| 6. Antigua dan Barbuda
(<i>Antigua and Barbuda</i>) | 21. Brasil, Republik
Federasi
(<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 36. Ekuador, Republik
(<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 7. Arab Saudi, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 22. Brunei Darussalam
(<i>Brunei Darussalam</i>) | 37. El Savador, Republik
(<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 8. Argentina, Republik
(<i>The Republic of Argentina</i>) | 23. Bulgaria, Republik
(<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 38. Estonia, Republik
(<i>Republic of Estonia</i>) |
| 9. Armenia, Republik
(<i>The Republic of Armenia</i>) | 24. Burkina Faso
(<i>Burkina Faso</i>) | 39. Filipina, Republik
(<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 10. Australia,
Persemakmuran
(<i>Commonwealth of Australia</i>) | 25. Burundi, Republik
(<i>The Republic of Burundi</i>) | 40. Fiji, Republik
Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) |
| 11. Austria, Republik
(<i>The Republic of Austria</i>) | 26. Cape Verde, Republik
(<i>The Republic of Cape Verde</i>) | 41. Finlandia, Republik
(<i>Republic of Finland</i>) |
| 12. Bahrain, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 27. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 42. Gabon, Republik
(<i>Gabonese Republic</i>) |
| 13. Bangladesh, Republik
Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 28. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) | 43. Gambia, Republik
(<i>Republic of the Gambia</i>) |
| 14. Barbados (Barbados) | 29. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 44. Georgia (<i>Georgia</i>) |
| 15. Belanda, Kerajaan
(Kingdom of Netherlands) | 30. Cina, Republik Rakyat
(<i>The People's Republic of China</i>) | 45. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) |
| 46. Grenada (<i>Grenada</i>) | 61. Italia, Republik
(<i>The Italian Republic</i>) | 76. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) |
| 47. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 62. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 77. Kuba, Republik (<i>Republic of Cuba</i>) |
| 48. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 63. Jepang (<i>Japan</i>) | 78. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) |
| 49. Guinea Bissau, Republik
(<i>Republic of Guinea-Bissau</i>) | 64. Jerman (<i>Germany</i>) | 79. Latvia, Republik (<i>Republic of Latvia</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 50. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 65. Kamboja, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 80. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 51. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 66. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of Cameroon</i>) | 81. Liechtenstein,
Kepangeranan
(<i>Principality of Liechtenstein</i>) |
| 52. Honduras, Republik
(<i>Republic of Honduras</i>) | 67. Komunitas Eropa
(<i>European Communities</i>) | 82. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 53. Hong Kong, Daerah
Administratif Khusus
(<i>Hong Kong Special Administrative Region</i>) | 68. Kanada (<i>Canada</i>) | 83. Luksemburg, Keadipatian
Agung (<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 54. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 69. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 84. Makau, Daerah
Administratif Khusus
(<i>Macau Special Administrative Region</i>) |
| 55. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 70. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 85. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 56. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of Indonesia</i>) | 71. Kongo, Republik
(<i>Republic of the Congo</i>) | 86. Makedonia, Republik (<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM</i>) |
| 57. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 72. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic Republic of the Congo</i>) | 87. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) |
| 58. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 73. Korea Selatan (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) | 88. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 59. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 74. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 89. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) |
| 60. Israel (<i>Israel</i>) | 75. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 90. Mali, Republik (<i>Republic of Mali</i>) |
| 91. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) | 107. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 123. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) |
| 92. Mauritania, Republik
Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 108. Pakistan, Republik
Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 124. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) |
| 93. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 109. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 125. Sierra Leone, Republik
(<i>Republic of Sierra Leone</i>) |

94. Mesir, Republik Arab
(*Arab Republic of Egypt*)
95. Meksiko, Perserikatan
Negara-Negara (*United
Mexican States*)
96. Moldova, Republik
(*Republic of Moldova*)
97. Mongolia (*Mongolia*)
98. Maroko, Kerajaan
(*Kingdom of Morocco*)
99. Mozambik, Republik
(*Republic of
Mozambique*)
100. Myanmar, Uni (*The
Union of Myanmar*)
101. Namibia, Republik
(*Republic of Namibia*)
102. Nepal, Republik Federal
Demokratik (*Federal
Democratic Republic of
Nepal*)
103. Niger, Republik
(*Republic of Niger*)
104. Nigeria, Republik
Federal (*Federal
Republic of Nigeria*)
105. Nikaragua, Republik
(*Republic of Nicaragua*)
106. Norwegia, Kerajaan
(*Kingdom of Norway*)
139. Togo, Republik
(*Togolese Republic*)
140. Tonga,
Kerajaan (*Kingdom of
Tonga*)
110. Pantai Gading,
Republik (*Republic of
Côte d'Ivoire*)
111. Papua Nugini, Negara
Independen
(*Independent State of
Papua New Guinea*)
112. Paraguay, Republik
(*Republic of
Paraguay*)
113. Perancis, Republik
(*France Republic*)
114. Peru, Republik
(*Republic of Peru*)
115. Polandia, Republik
(*Republic of Poland*)
116. Portugal, Republik
(*Republic of Portugal*)
117. Qatar, Negara (*State
of Qatar*)
118. Rumania (*Romania*)
119. Rwanda, Republik
(*Republic of Rwanda*)
120. Saint Kitts dan Nevis,
Federasi (*Federation
of Saint Kitts and
Nevis*)
121. Saint Lucia (*Saint
Lucia*)
122. Saint Vincent dan
Grenadines (*Saint
Vincent and the
Grenadines*)
144. Uganda, Republik
(*Republic of Uganda*)
145. Ukraina (*Ukraine*)
126. Singapura, Republik
(*The Republic of
Singapore*)
127. Siprus, Republik
(*Republic of Cyprus*)
128. Slovakia, Republik
(*Slovak Republic*)
129. Slovenia, Republik
(*Republic of Slovenia*)
130. Solomon, Kepulauan
(*Solomon Islands*)
131. Spanyol, Kerajaan (*The
Kingdom of Spain*)
132. Sri Lanka, Republik
Sosial Demokratik
(*Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka*)
133. Suriname, Republik
(*Republic of Suriname*)
134. Swaziland, Kerajaan
(*Kingdom of
Swaziland*)
135. Swedia, Kerajaan (*The
Kingdom of Sweden*)
136. Swiss, Konfederasi
(*Swiss
Confederation/Switzerl
and*)
137. Tanzania, Republik
Persatuan (*United
Republic of Tanzania*)
138. Thailand, Kerajaan
(*Kingdom of Thailand*)
149. Vietnam, Republik
Sosial (*The Socialist
Republic of Vietnam*)
150. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (*The
Hashemite Kingdom of
Jordan*)

- | | | |
|---|--|--|
| 141. Trinidad dan Tobago, Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) | 146. Uni Emirat Arab (<i>United Arab Emirates</i>) | 151. Yunani/Hellenik, Republik (<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |
| 142. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) | 147. Uruguay, Republik Timur (<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) | 152. Zambia, Republik (<i>Republic of Zambia</i>) |
| 143. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | 148. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) | 153. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |

E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention*)

1). Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 14. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 27. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) |
| 2. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 15. Barbados (<i>Barbados</i>) | 28. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) |
| 3. Albania, Republik (<i>Republic of Albania</i>) | 16. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 29. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) |
| 4. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 17. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 30. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 5. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 18. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 31. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 6. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 19. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 32. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |

7. Argentina, Republik (*The Republic of Argentina*)
8. Armenia, Republik (*The Republic of Armenia*)
9. Australia, Persemakmuran (*Commonwealth of Australia*)
10. Austria, Republik (*The Republic of Austria*)
11. Azerbaijan, Republik (*Republic of Azerbaijan*)
12. Bahama, Persemakmuran (*Commonwealth of The Bahamas*)
13. Bahrain, Kerajaan (*The Kingdom of Bahrain*)
40. Georgia (*Georgia*)
41. Ghana, Republik (*Republic of Ghana*)
42. Grenada (*Grenada*)
43. Guatemala, Republik (*Republic of Guatemala*)
44. Guinea, Republik (*Republic of Guinea*)
45. Guyana, Republik (*Republic of Guyana*)
20. Bosnia dan Herzegovina (*Bosnia and Herzegovina*)
21. Botswana, Republik (*Republic of Botswana*)
22. Brunei Darussalam (*Brunei Darussalam*)
23. Bulgaria, Republik (*The Republic of Bulgaria*)
24. Burkina Faso (*Burkina Faso*)
25. Burundi, Republik (*The Republic of Burundi*)
26. Cape Verde, Republik (*The Republic of Cape Verde*)
55. Jamaika (*Jamaica*)
56. Japan (*Jepang*)
57. Jerman (*Germany*)
58. Kamboja, Kerajaan (*The Kingdom of Cambodia*)
59. Kamerun, Republik (*The Republic of Cameroon*)
60. Kazakhstan, Republik (*Republic of Kazakhstan*)
33. El Salvador (*El Salvador*)
34. Estonia, Republik (*Republic of Estonia*)
35. Fiji, Republik Kepulauan (*Republic of the Fiji Islands*)
36. Filipina, Republik (*The Republic of Philippines*)
37. Finlandia, Republik (*Republic of Finland*)
38. Gabon, Republik (*Gabonese Republic*)
39. Gambia, Republik (*Republic of the Gambia*)
70. Latvia, Republik (*Republic of Latvia*)
71. Lebanon, Republik (*Republic of Lebanon*)
72. Lesotho, Kerajaan (*Kingdom of Lesotho*)
73. Liberia, Republik (*Republic of Liberia*)
74. Lituania, Republik (*Republic of Lithuania*)
75. Luksemburg, Keadipatian Agung (*Grand Duchy of Luxembourg*)

- | | | |
|--|--|--|
| 46. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 61. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 76. Madagaskar,
Republik (<i>Republic
of Madagascar</i>) |
| 47. Honduras, Republik
(<i>Republic of
Honduras</i>) | 62. Kolombia, Republik
(<i>Republic of
Colombia</i>) | 77. Makedonia,
Republik (<i>The
Former Yugoslav
Republic of
Macedonia
/FYROM</i>) |
| 48. Hongaria, Republik
(<i>Republic of
Hungary</i>) | 63. Komoro, Perserikatan
(<i>Union of the
Comoros</i>) | 78. Malawi, Republik
(<i>Republic of
Malawi</i>) |
| 49. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of
Indonesia</i>) | 64. Kongo, Republik
(<i>Republic of the
Congo</i>) | 79. Malaysia
(<i>Malaysia</i>) |
| 50. Inggris (<i>United
Kingdom/United
Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland</i>) | 65. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic
Republic of the
Congo</i>) | 80. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) |
| 51. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 66. Kosovo, Republik
(<i>Republic of Kosovo</i>) | 81. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) |
| 52. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 67. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa
Rica</i>) | 82. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of
Morocco</i>) |
| 53. Israel (<i>Israel</i>) | 68. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 83. Mauritania,
Republik Islam
(<i>Islamic Republic of
Mauritania</i>) |
| 54. Italia, Republik (<i>The
Italian Republic</i>) | 69. Kuwait, Negara
(<i>State of Kuwait</i>) | 84. Mauritius, Republik
(<i>Republic of
Mauritius</i>) |
| 85. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of
Egypt</i>) | 100. Paraguay, Republik
(<i>Republic of
Paraguay</i>) | 115. Seychelles,
Republik (<i>The
Republic of
Seychelles</i>) |
| 86. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of
Micronesia</i>) | 101. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 116. Sierra Leone,
Republik (<i>Republic
of Sierra Leone</i>) |
| 87. Moldova, Republik
(<i>Republic of
Moldova</i>) | 102. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 117. Singapura,
Republik (<i>Republic
of Singapore</i>) |
| 88. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 103. Portugal, Republik
(<i>Republic of
Portugal</i>) | 118. Siprus, Republik
(<i>Republic of
Cyprus</i>) |

- | | | | | | |
|------|--|------|---|------|---|
| 89. | Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 104. | Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 119. | Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 90. | Nepal, Republik
Federal Demokratik
(<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 105. | Rumania (<i>Romania</i>) | 120. | Slovenia, Republik
(<i>Republic of Slovenia</i>) |
| 91. | Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 106. | Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) | 121. | Solomon,
Kepulauan
(<i>Solomon Islands</i>) |
| 92. | Nigeria, Republik
Federal (<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 107. | Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 122. | Somalia, Republik
(<i>Republic of Somalia</i>) |
| 93. | Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 108. | Saint Kitts dan Nevis,
Federasi (<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) | 123. | Spanyol, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 94. | Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Norway</i>) | 109. | Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) | 124. | Sri Lanka, Republik
Sosial Demokratik
(<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 95. | Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 110. | Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 125. | Sudan, Republik
(<i>The Republic of The Sudan</i>) |
| 96. | Pakistan, Republik
Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 111. | Samoa, Negara
Independen
(<i>Independent State of Samoa</i>) | 126. | Swaziland,
Kerajaan (<i>Kingdom of Swaziland</i>) |
| 97. | Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 112. | Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) | 127. | Swedia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 98. | Pantai Gading,
Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 113. | Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 128. | Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss Confederation/ Switzerland</i>) |
| 99. | Papua Nugini,
Negara Independen
(<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) | 114. | Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 129. | Syria, Republik
Arab (<i>Syrian Arab Republic</i>) |
| 130. | Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) | 137. | Turkmenistan
(<i>Turkmenistan</i>) | 144. | Yaman, Republik
(<i>Republic of Yemen</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 131. Timor-Leste (<i>Timor-Leste</i>) | 138. Uganda, Republik (<i>Republic of Uganda</i>) | 145. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 132. Togo (<i>Togo</i>) | 139. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 146. Yunani/Hellenik, Republik (<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |
| 133. Tonga (<i>Tonga</i>) | 140. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) | 147. Zambia, Republik (<i>Republic of Zambia</i>) |
| 134. Trinidad dan Tobago, Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) | 141. Uruguay, Republik TImur (<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) | 148. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 135. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) | 142. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |
| 136. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | 143. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) | |

2) Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 / New York Convention*)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 14. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 27. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 15. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 28. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 16. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 29. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 17. Barbados (<i>Barbados</i>) | 30. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 18. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 31. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 19. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 32. Cook, Kepulauan (<i>The Cook Islands</i>) |
| 7. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 20. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 33. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 8. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 21. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 34. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 9. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 22. Bolivia (<i>The Plurinational State of Bolivia</i>) | 35. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 10. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 23. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 36. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 11. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 24. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 37. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 12. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 25. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 38. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 13. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 26. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 39. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 40. Fiji, Republik (<i>Republic of Fiji</i>) | 54. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 68. Kolombia, Republik (<i>Republic of Colombia</i>) |
| 41. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) | 55. Irlandia, Republik (<i>Republic of Ireland</i>) | 69. Korea, Republik/Korea Selatan (<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) |
| 42. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 56. Islandia, Republik (<i>Republic of Iceland</i>) | 70. Kosta Rika, Republik (<i>Republic of Costa Rica</i>) |
| 43. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) | 57. Israel (<i>Israel</i>) | 71. Kroasia, Republik (<i>Republic of Croatia</i>) |
| 44. Georgia (<i>Georgia</i>) | 58. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 72. Kuba, Republik (<i>Republic of Cuba</i>) |
| 45. Ghana, Republik (<i>Republic of Ghana</i>) | 59. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 73. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) |
| 46. Guatemala, Republik (<i>Republic of Guatemala</i>) | 60. Jepang (<i>Japan</i>) | 74. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (<i>The Lao People's Democratic Republic</i>) |
| 47. Guinea, Republik (<i>Republic of Guinea</i>) | 61. Jerman (<i>Germany</i>) | 75. Latvia, Republik (<i>Republic of Latvia</i>) |
| 48. Haiti, Republik (<i>Republic of Haiti</i>) | 62. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 76. Lebanon, Republik (<i>Republic of Lebanon</i>) |
| 49. Honduras, Republik (<i>Republic of Honduras</i>) | 63. Kamerun, Republik (<i>The Republic of Cameroon</i>) | 77. Lesotho, Kerajaan (<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 50. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 64. Kanada (<i>Canada</i>) | 78. Liberia, Republik (<i>Republic of Liberia</i>) |

- | | | |
|--|--|--|
| 51. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 65. Kazakhstan, Republik
(<i>Republic of Kazakhstan</i>) | 79. Liechtenstein,
Kepangeranan
(<i>The Principality of Liechtenstein</i>) |
| 52. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of Indonesia</i>) | 66. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 80. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 53. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 67. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 81. Luksemburg,
Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 82. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) | 96. Montenegro
(<i>Montenegro</i>) | 110. Polandia, Republik
(<i>The Republic of Poland</i>) |
| 83. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia/FYROM</i>) | 97. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 111. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) |
| 84. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 98. Nepal, Republik
Federal Demokratik
(<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 112. Qatar, Negara
(<i>State of Qatar</i>) |
| 85. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) | 99. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 113. Rumania
(<i>Romania</i>) |
| 86. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) | 100. Nigeria, Republik
Federal (<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 114. Rusia, Federasi
(<i>The Russian Federation</i>) |
| 87. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) | 101. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 115. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) |
| 88. Marshall, Republik
Kepulauan (<i>Republic of the Marshall Islands</i>) | 102. Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Norway</i>) | 116. Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) |
| 89. Mauritania, Republik
Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 103. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 117. San Marino,
Republik (<i>Republic of San Marino</i>) |
| 90. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 104. Pakistan, Republik
Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 118. Selandia Baru
(<i>New Zealand</i>) |
| 91. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) | 105. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 119. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) |

- | | | |
|--|--|--|
| 92. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 106. Pantai Gading,
Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 120. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) |
| 93. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 107. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 121. Singapura,
Republik (<i>Republic of Singapore</i>) |
| 94. Monako, Kepangeranan
(<i>Principality of Monaco</i>) | 108. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 122. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) |
| 95. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 109. Peru , Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 123. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 124. Slovenia, Republik
(<i>Republic of Slovenia</i>) | 132. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) | 140. Vatikan (<i>The Holy See/State of the Vatican City</i>) |
| 125. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 133. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) | 141. Venezuela,
Republik Bolivar
(<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) |
| 126. Sri Lanka, Republik
Sosialis Demokratik
(<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 134. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 142. Vietnam, Republik
Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 127. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 135. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) | 143. Yordania
Hashimiah,
Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 128. Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss Confederation/ Switzerland</i>) | 136. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 144. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |
| 129. Syria, Republik Arab
(<i>Syrian Arab Republic</i>) | 137. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) | 145. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 130. Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) | 138. Uruguay, Republik
Timur
(<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) | 146. Zimbabwe,
Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 131. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 139. Uzbekistan, Republik
(<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |

F. Daftar Negara Penandatanganan Konvensi Pembentukan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

-
- | | | |
|--|--|--|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 14. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 27. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 15. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 28. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 16. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 29. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 17. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 30. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 18. Barbados (<i>Barbados</i>) | 31. Cape Verde, Republik (<i>The Republic of Cape Verde</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 19. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 32. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) |
| 7. Angola, Republik (<i>The Republic of Angola</i>) | 20. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 33. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) |
| 8. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 21. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 34. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) |
| 9. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 22. Belize (<i>Belize</i>) | 35. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 10. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 23. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 36. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 11. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 24. Bolivia, Republik (<i>Republic of Bolivia</i>) | 37. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 12. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 25. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 38. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 13. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 26. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 39. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 40. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) | 54. Guatemala, Republik (<i>Republic of Guatemala</i>) | 68. Israel (<i>Israel</i>) |
| 41. El Savador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) | 55. Guinea Bissau, Republik (<i>Republic of Guinea-Bissau</i>) | 69. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) |
| 42. Equatorial Guinea, Republik (<i>Republic of Equatorial Guinea</i>) | 56. Guinea, Republik (<i>Republic of Guinea</i>) | 70. Jamaika (<i>Jamaica</i>) |
| 43. Eritrea (<i>Eritrea</i>) | 57. Guyana, Republik (<i>Republic of Guyana</i>) | 71. Jepang (<i>Japan</i>) |
| 44. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) | 58. Haiti, Republik (<i>Republic of Haiti</i>) | 72. Jerman (<i>Germany</i>) |
| 45. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>) | 59. Honduras, Republik (<i>Republic of Honduras</i>) | 73. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) |
| 46. Fiji, Republik Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) | 60. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 74. Kamerun, Republik (<i>The Republic of Cameroon</i>) |
| 47. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) | 61. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 75. Kanada (<i>Canada</i>) |
| 48. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 62. Indonesia, Republik (<i>The Republic of Indonesia</i>) | 76. Kazakhstan, Republik (<i>Republic of Kazakhstan</i>) |
| 49. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) | 63. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 77. Kenya, Republik (<i>Republic of Kenya</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 50. Gambia, Republik
(<i>Republic of the
Gambia</i>) | 64. Irak, Republik
(<i>Republic of Iraq</i>) | 78. Kirgizstan,
Republik (<i>Kyrgyz
Republic</i>) |
| 51. Georgia (<i>Georgia</i>) | 65. Iran, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic
of Iran</i>) | 79. Kolombia, Republik
(<i>Republic of
Colombia</i>) |
| 52. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) | 66. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 80. Kongo, Republik
(<i>Republic of the
Congo</i>) |
| 53. Grenada (<i>Grenada</i>) | 67. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 81. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic
Republic of the
Congo</i>) |
| 82. Korea Selatan/Korea,
Republik (<i>South
Korea/The Republic
of Korea</i>) | 96. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav
Republic of Macedonia
/FYROM</i>) | 110. Montenegro
(<i>Montenegro</i>) |
| 83. Kosovo, Republik
(<i>Republic of Kosovo</i>) | 97. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) | 111. Mozambik,
Republik (<i>Republic
of Mozambique</i>) |
| 84. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa
Rica</i>) | 98. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 112. Namibia, Republik
(<i>Republic of
Namibia</i>) |
| 85. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 99. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) | 113. Nepal, Republik
Federal Demokratik
(<i>Federal
Democratic
Republic of Nepal</i>) |
| 86. Kuwait, Negara (<i>State
of Kuwait</i>) | 100. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) | 114. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) |
| 87. Laos, Republik
Demokrasi Rakyat
(<i>The Lao People's
Democratic Republic</i>) | 101. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) | 115. Nigeria, Republik
Federal (<i>Federal
Republic of
Nigeria</i>) |
| 88. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) | 102. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) | 116. Nikaragua,
Republik (<i>Republic
of Nicaragua</i>) |
| 89. Lebanon, Republik
(<i>Republic of
Lebanon</i>) | 103. Mauritania, Republik
Islam (<i>Islamic Republic
of Mauritania</i>) | 117. Norwegia,
Kerajaan (<i>The
Kingdom of
Norway</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 90. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) | 104. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 118. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) |
| 91. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) | 105. Meksiko Serikat,
Negara (<i>The United Mexican States</i>) | 119. Pakistan, Republik
Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 92. Libya Sosialis Raya,
Jamahiriya Rakyat Arab
(<i>The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya</i>) | 106. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 120. Palau, Republik
(<i>Republic of Palau</i>) |
| 93. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) | 107. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of Micronesia</i>) | 121. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) |
| 94. Luksemburg,
Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 108. <i>Moldova</i> , Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 122. Pantai Gading,
Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) |
| 95. Madagaskar,
Republik (<i>Republic of Madagascar</i>) | 109. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 123. Papua Nugini,
Negara Independen
(<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) |
| 124. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 138. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 152. Swaziland,
Kerajaan (<i>Kingdom of Swaziland</i>) |
| 125. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 139. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 153. Swedia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 126. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 140. Seychelles, Republik
(<i>The Republic of Seychelles</i>) | 154. Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss Confederation/ Switzerland</i>) |
| 127. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) | 141. Sierra Leone, Republik
(<i>Republic of Sierra Leone</i>) | 155. Syria, Republik
Arab (<i>Syrian Arab Republic</i>) |
| 128. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 142. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 156. Tajikistan,
Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 129. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 143. Siprus, Republik (<i>Republic of Cyprus</i>) | 157. Tanzania, Republik Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) |
| 130. Rumania (<i>Romania</i>) | 144. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 158. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) |
| 131. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) | 145. Slovenia, Republik (<i>Republic of Slovenia</i>) | 159. Timor Timur (<i>East Timor</i>) |
| 132. Rwanda, Republik (<i>Republic of Rwanda</i>) | 146. Solomon, Kepulauan (<i>Solomon Islands</i>) | 160. Togo, Republik (<i>Togolese Republic</i>) |
| 133. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) | 147. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 161. Trinidad dan Tobago, Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) |
| 134. Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) | 148. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 162. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) |
| 135. Saint Vincent dan Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 149. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 163. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) |
| 136. Samoa, Negara Independen (<i>Independent State of Samoa</i>) | 150. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 164. Turkministan (<i>Turkmenistan</i>) |
| 137. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) | 151. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 165. Uganda, Republik (<i>Republic of Uganda</i>) |
| 166. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 170. Vanuatu, Republik (<i>Republic of Vanuatu</i>) | 174. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 167. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) | 171. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) | 175. Yunani/Hellenik, Republik (<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |

- | | | |
|---|--|---|
| 168. Uruguay, Republik Timur
(<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) | 172. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) | 176. Zambia, Republik (<i>Republic of Zambia</i>) |
| 169. Uzbekistan, Republik
(<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | 173. Yaman, Republik
(<i>Republic of Yemen</i>) | 177. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 18 JULI 2011

Pedoman Pelayanan Prima Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) PTSP Di Bidang Penanaman Modal

A. Pelayanan Prima

I. Indikator Pelayanan Prima

1. Waktu pelayanan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat atau menambah jumlah petugas jika terlihat antrian yang panjang;
2. Jadwal Petugas *front office* dan petugas konseling (*help desk*) diatur oleh Kepala sesuai kondisi dan situasi setempat;
3. Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas yang bertugas wajib menata administrasi, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik; dan
4. Setelah jam pelayanan seluruh petugas wajib menata kembali administrasi.

II. Standar Etika

A. Etika berpenampilan

1. Pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi dan disesuaikan dengan aturan pakaian/busana kantor.
2. Selalu bersepatu di ruang kerja.
3. Selalu mengenakan kartu identitas pegawai di dada (disematkan/digantung dengan rapi).

B. Etika melayani

1. Menyapa tamu yang datang (misalnya "selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?").
2. Selalu menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit pelayanan.
3. Berikan pandangan dan perhatian yang sopan kepada tamu yang dihadapi dan tidak memandangi ke arah lain.
4. Selalu bersikap ramah-3 S (senyum, sapa, dan salam).
5. Dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh calon investor/investor. Jangan melakukan aktivitas lain saat mendengarkan.

6. Jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi.
7. Hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau calon investor/investor yang dilayani.
8. Tatalah waktu berkonsultasi dengan seefisien mungkin.
9. Sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada calon investor/investor dengan menggunakan kedua tangan.
10. Jika memungkinkan, jabatlah tangan tamu anda setiap selesai melayani dan selalu ucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat.
11. Sedapat mungkin memberikan map, berkas atau dokumen dengan menggunakan kedua tangan dan disertai senyuman.
12. Hindarilah melayani tamu sambil makan/minum, jika perlu minum/makan agar tidak dilakukan di hadapan tamu, minta izin kepada sesama petugas agar setiap tamu tetap dilayani dan tidak dibiarkan menunggu.
13. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan calon investor/investor, petugas memohon maaf kepada calon investor/investor dan agar digantikan oleh petugas lain.
14. Siaga melayani pertanyaan calon investor/investor. Apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya atau apabila tingkat persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang kompeten (misalnya Kasi).
15. Petugas PTSP yang melayani calon investor/investor orang asing agar memiliki kemampuan bahasa Inggris;
16. Petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga calon investor/investor dapat mengerti dengan baik.
17. Untuk lebih meyakinkan, petugas dapat menggunakan brosur/leaflet/buku peraturan yang mendukung.
18. Apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan calon investor/investor agar calon investor/investor tidak ditanya berkali-kali.
19. Apabila petugas belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan calon investor/investor harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas diharapkan untuk meminta maaf (misalnya dengan pernyataan "Mohon Maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu permasalahan ini akan saya teruskan kepada rekan kami/atasan saya yang lain untuk membantu Bapak/Ibu").
20. Setiap tamu yang datang ke PTSP, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilakan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
21. Apabila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap ramah,

(misalnya dengan menggunakan kalimat seperti : "Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu").

22. Akan lebih baik bila Petugas dapat menjelaskan berapa lama calon investor/ investor harus menunggu, (misalnya dapat menggunakan kalimat seperti : "Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali. Terima Kasih").
23. Apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu yang mengakibatkan petugas tidak dapat melayani dengan baik, sehingga calon investor/ investor menjadi tidak sabar/marah, maka yang harus diperhatikan antara lain adalah:
 - § Petugas meminta maaf atas situasi ini;
 - § Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak;
 - § Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan by system);
 - § Menanyakan kesediaan calon investor/investor untuk menunggu;
 - § Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila calon investor/investor memilih untuk meninggalkan PTSP untuk sementara waktu;
 - § Memberitahu calon investor/investor saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai.
24. Jika memungkinkan, agar disediakan minuman ringan kepada calon investor/investor yang sedang menunggu (misalnya dengan pengadaan dispenser dan lain-lain).
25. Bila Petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh calon investor/investor misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai calon investor/investor memahami dengan baik.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

I. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

II. Penyiapan Bahan

1. Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu PTSP adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

2. Bentuk Jawaban

Kategori *tidak baik* diberi nilai persepsi 1,
 Kategori *kurang baik* diberi nilai persepsi 2,
 Kategori *baik* diberi nilai persepsi 3, dan
 Kategori *sangat baik* diberi nilai persepsi 4.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

- a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan; atau
- b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara.

III. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar $(\text{"Jumlah unsur"} + 1) \times 5 = \text{jumlah responden}$
 $(14 + 1) \times 5 = 45$ responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan di:

- 1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada saat sibuk;
- 2) Di lingkungan perumahan untuk penerima layanan penanaman modal pada saat responden di rumah.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja; dan
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.

IV. Pengolahan Data

1. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan

masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

2. Perangkat Pengolahan

- 1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14);
- 2) Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
 Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
 Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
- b) Nilai indeks pelayanan
 Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

V. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

1. Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Prosedur Pelayanan	3,45
2.	Persyaratan Pelayanan	2,65
3.	Kejelasan petugas pelayanan	3,53
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,31
5.	Tanggung jawab petugas pelayanan	1,55
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,12
7.	Kecepatan pelayanan	2,13
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,43
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	3,21

10.	Kewajaran biaya pelayanan	1,45
11.	Kepastian biaya pelayanan	1,93
12.	Kepastian jadwal pelayanan	2,31
13.	Kenyamanan lingkungan	3,03
14.	Kenyamanan pelayanan	1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,45 \times 0,071) + (2,65 \times 0,071) + (3,53 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) + (1,55 \times 0,071) + (3,12 \times 0,071) + (2,13 \times 0,071) + (2,43 \times 0,071) + (3,21 \times 0,071) + (1,45 \times 0,071) + (1,93 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) + (3,03 \times 0,071) + (1,56 \times 0,071) = \text{Nilai indeks adalah } 2,462$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,462 \times 25 = 61,55$
- b. Mutu pelayanan C.
- c. Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

**KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BIDANG :
 UNIT PELAYANAN :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

..... 20....

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) (Lingkari kode angka sesuai jabatan masyarakat/responden)		Diisi Oleh Petugas
Nomor Responden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umur tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	1. Laki - laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir	1. SD Kebawah 4. D1 - D3 - D4 2. SLTP 5. S - 1 3. SLTA 6. S - 2 Keatas	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS/TNI/POLRI 4. Pelajar/Mahasiswa 2. Pegawai Swasta 5. Lainnya 3. Wiraswasta/Usahawan	<input type="checkbox"/>

II. DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA

NAMA	
NIP/DATA LAIN	

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini? a. Tidak adil b. Kurang adil c. Adil d. Sangat adil	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani? a. Tidak jelas b. Kurang jelas c. Jelas d. Sangat jelas	1 2 3 4	10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan? a. Tidak wajar b. Kurang wajar c. Wajar d. Sangat wajar	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin	1 2 3 4	11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan? a. Selalu Tidak sesuai b. Kadang – kadang sesuai c. Banyak sesuainya d. Selalu sesuai	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan? a. Tidak bertanggung jawab b. Kurang bertanggung jawab c. Bertanggung jawab d. Sangat bertanggung jawab	1 2 3 4	12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan? a. Selalu Tidak tepat b. Kadang – kadang tepat c. Banyak tepatnya d. Selalu tepat	1 2 3 4

<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?</p> <p>a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Mampu d. Sangat mampu</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?</p> <p>a. Tidak nyaman b. Kurang nyaman c. Nyaman d. Sangat nyaman</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?</p> <p>a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?</p> <p>a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman d. Selalu aman</p>	<p>1 2 3 4</p>

PETUNJUK PENGISIAN

Formulir Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Cara Manual

1. Unit pelayanan : Isilah dengan jelas nama unit pelayanan yang dinilai
2. Alamat : Isilah dengan lengkap alamat unit pelayanan yang dinilai (sampai dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi) nama jalan, Kode Pos dan Nomor Telepon/*Fax*.
3. Nomor urut responden : Isilah urutan responden dari awal sampai terakhir sehingga secara otomatis dapat diketahui jumlah responden.
4. Nilai per unsur pelayanan s.d. U14 : Isilah unsur pelayanan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh responden, dari U1 sd U14 sama dengan urutan dalam kuesioner.
5. Jumlah nilai unsur pelayanan : Isilah dengan menjumlah nilai masing – masing unsur (kebawah) sesuai dengan jumlah responden yang mengisi.
6. Nilai rata – rata (NRR) per unsur pelayanan : Isilah nilai rata – rata IKM per unsur pelayanan dengan cara jumlah nilai masing – masing unsur dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
7. Jumlah NRR tertimbang per unsur pelayanan : Isilah jumlah nilai per unsur pelayanan dikalikan 0,071 (nilai bobot rata – rata tertimbang).
8. *) Jumlah NRR IKM tertimbang unit pelayanan : Isilah dengan menjumlahkan NRR IKM tertimbang per unsur pelayanan dari U1 s.d. U14.
9. **) IKM unit pelayanan : Isilah dengan jumlah nilai IKM unit pelayanan kali nilai dasar yaitu 25.

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JULI 2011

Bentuk Surat Teguran Tertulis

A. Bentuk Surat Teguran Tertulis I (Pertama)

KOP SURAT BKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Teguran Tertulis
 (Pertama)

Yth.

Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *)

.....

Sehubungan dengan dilakukannya pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa dari hasil evaluasi diketahui bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara mencapai hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan pertama dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran kedua.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

B. Bentuk Surat Teguran Tertulis II (Kedua)

KOP SURAT BKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Teguran Tertulis
 (Kedua)

Yth.

Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *)

.....

Sehubungan dengan Teguran Tertulis (Pertama) melalui surat kami No..... tanggal..... dan telah dilakukannya pengukuran kembali atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan kedua dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran ketiga.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

C. Bentuk Surat Teguran Tertulis III (Ketiga)

KOP SURAT BKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Teguran Tertulis
 (Ketiga)

Yth.

Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PDKPM atau PPTSP KABUPATEN/KOTA, PTSP KPBPB, PTSP KEK *)

Sehubungan Teguran Tertulis (Pertama) dan Teguran Tertulis (Kedua) melalui surat kami No..... tanggal..... dan No..... tanggal..... dan telah dengan dilakukannya pengukuran terakhir atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik *) dan hasil penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP Saudara menurun dari bintang

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami memberikan peringatan ketiga dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari Saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan sehingga kualifikasi PTSP Saudara kembali menjadi bintang Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Apabila setelah evaluasi ulang yang terakhir tetap tidak ada perbaikan pelayanan dan peningkatan kualifikasi PTSP Saudara, maka kami dengan sangat menyesal untuk sementara waktu akan menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang telah dilimpahkan/ditugaskan*) kepada Gubernur/Bupati/Walikota*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JULI 2011

Bentuk Format Laporan Kepala BKPM Kepada Presiden Republik Indonesia Tentang Perkembangan Penanaman Modal Secara Nasional

KOP SURAT BKPM

LAPORAN KEPALA BKPM KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL SECARA NASIONAL

- I. Ringkasan Eksekutif
 Uraian ringkas berisi hal-hal pokok mengenai perkembangan penanaman modal dan kinerja penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
- II. Pendahuluan
 Perkembangan ekonomi nasional, regional dan global antara lain mencakup:
 1. Stabilitas ekonomi;
 2. Sektor eksternal yaitu Neraca Pembayaran termasuk *Foreign Direct Investment* (FDI);
 3. Sektor keuangan suku bunga, perkembangan kredit dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG);
 4. Sektor riil *Gross Domestic Product* (GDP) beserta komponennya, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);
 5. Hasil pemeringkatan lembaga internasional terhadap iklim investasi.
- III. Perkembangan kebijakan di bidang penanaman modal
- IV. Perkembangan Penanaman Modal:
 - A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor;
 - b. Berdasarkan Lokasi;
 - c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang).
 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor;
 - b. Berdasarkan Lokasi;
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional);
 - d. Berdasarkan Peringkat Negara;
 - e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang);
 - f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang).
 - B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (berdasarkan Izin Usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (Dirinci untuk setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK)

No	Lokasi (Kab/Kota/ KPBPB/KEK)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					

8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing (Dirinci untuk setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK)

No	Lokasi (Kab/Kota/ KPBPB/KEK)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan					

	elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (Dirinci setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK)

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					

7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						

n.						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing (Dirinci setiap Kabupaten/Kota atau di KPBPB atau di KEK)

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan					

	farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

7. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

8. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

9. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				

b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)			
1.			
.			
.			
n.			

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi, KPBPB, KEK

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal.
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP di bidang penanaman modal.
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.

D. Saran

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JULI 2011

Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDKPM atau Kepala PPTSP Kabupaten/Kota kepada Kepala PDPPM atau Kepala PPTSP Provinsi tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

KOP SURAT PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota

Nomor :/20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Yth.
 Kepala PDPPM atau PPTSP Provinsi
 di -

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten/Kotatahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala PDKPM atau PPTSP
 Kabupaten/Kota,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik					

	dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						

n.						
Jumlah						

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					

III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					

4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin					

	dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
n.				

6. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
n.				

7. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				

b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

5. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal.
6. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP di bidang penanaman modal.
7. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
8. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.

D. Saran

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JULI 2011

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK
 Kepada Kepala BKPM tentang Data Penanaman Modal di Provinsi/ Kawasan
 Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus.....

KOP SURAT PDPPM atau PPTSP PROVINSI, PTSP KPBPB, PTSP KEK

Nomor :/20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 di -
 Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Provinsi/Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala PDPPM atau PPTSP PROVINSI,
 PTSP KPBPB, PTSP KEK,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja Indonesia	Tenaga Kerja Asing		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek				
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)								
1.								
.								
.								
.								
n.								
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)								
1.								
.								
.								
.								
n.								

C. Penggabungan (*merger*)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
.							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BKPM

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 JULI 2011

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKPM atau Kepala PPTSP Kabupaten/Kota kepada Kepala PDPPM atau Kepala PPTSP Provinsi tentang Data Penanaman Modal di Kabupaten/Kota.....

KOP SURAT PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota

Nomor :/20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
 Kepala PDPPM atau PPTSP Provinsi...
 di -

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Kabupaten/Kota..... tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala PDKPM /PPTSP
 Kabupaten/Kota.....

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
.							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

- 3 -

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja	Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek		
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.						
.						
.						
.						
n.						
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.						
.						
.						
.						
n.						

C. Penggabungan (merger)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
.							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$, Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja	Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek		
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.						
.						
.						
.						
n.						
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.						
.						
.						
.						
n.						

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta) 1. . . . n.	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
	b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu) 1. . . . n.						

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

GITA IRAWAN WIRJAWAN